

## ABSTRAK

### AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA E-COMMERCE PADA PENGUNAAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (Analisis Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023)

Oleh : Nabila Priscillia Ars'y Nada

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Zainuri., S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping : Anita., S.H., M.H.

Latar belakang pada penelitian ini yakni dikarenakan seringkali banyak pelaku usaha yang masih tidak terklasifikasikan bidang usahanya pada klasifikasi baku lapangan usaha indonesia dalam melakukan sebuah perjanjian tidak dilandaskan pada itikad baik maka yang banyak dirugikan adalah konsumen. Klasifikasi baku lapangan usaha indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dari hal tersebut terdapat rumusan masalah yakni, apa urgensi penggunaan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia terkait perdagangan melalui sistem elektronik, bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha *e-commerce* dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Metode penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Dengan pendekatan perundang-undangan dan Konseptual yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum.

Pembahasan dalam penelitian ini berisi tentang urgensi penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), ialah untuk memberikan jaminan kepastian hukum khususnya bagi konsumen agar terhindar dari pelaku usaha yang ingin melakukan perbuatan melawan hukum maupun akibat hukum pelaku usaha *e-commerce* dalam perdagangan melalui sistem elektronik

Kesimpulan penelitian ini berisi tentang urgensi klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia terkait perdagangan melalui sistem elektronik maupun akibat hukum pelaku usaha *e-commerce* dengan menganalisis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dengan hukum perdata, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

**Kata Kunci** : Akibat Hukum, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, Pelaku Usaha *E-Commerce*

## **ABSTRACK**

### ***EFFECTS OF E-COMMERCE ENTERPRISE LAWS ON THE USE OF THE INDONESIAN STANDARD CLASSIFICATION OF BUSINESS FIELDS (Analysis of Article 4 of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 31 of 2023)***

By : Nabila Priscillia Ars'y Nada

Main Supervisor: Dr. Zainuri., S.H., M.H.

Companion Supervisor Lecturer: Anita., S.H., M.H.

*The background to this research is that because often many business actors whose fields of business are not classified in the standard classification of Indonesian business fields when entering into an agreement are not based on good faith, the consumers who suffer the most losses. The standard classification of Indonesian business fields is contained in Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023 concerning Business Licensing, Advertising, Guidance and Supervision of Business Actors in Trading Through Electronic Systems (PMSE).*

*From this, there is a problem formulation, namely, what is the urgency of using the standard classification of Indonesian business fields related to trading via electronic systems, what are the legal consequences for e-commerce business actors in trading via electronic systems.*

*The research method used is normative juridical research. Normative juridical research is also called doctrinal legal research. With a statutory and conceptual approach, namely providing an analytical perspective on solving problems in legal research.*

*The discussion in this research contains the urgency of using the Standard Classification of Indonesian Business Fields Related to Trading Through Electronic Systems, namely to provide guarantees of legal certainty, especially for consumers in order to avoid business actors who want to commit acts against the law or the legal consequences of e-commerce business actors in trading via electronic system*

*The conclusion of this research contains the urgency of the standard classification of Indonesian business fields related to trade via electronic systems and the legal consequences of e-commerce business actors by analyzing Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023 concerning Business Licensing, Advertising, Guidance and Supervision of Business Actors in Trading Through Electronic Systems, with civil law, and Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading via Electronic Systems.*

***Keywords: Legal Effects, Standard Classification of Indonesian Business Fields, E-Commerce Business Actors***